



KR-Antara/Anis Efizudin

PANEN RAYA WORTEL: Petani memanen wortel di perladangan kawasan lereng Gunung Sindoro, Desa Sigidang, Kejajar, Wonosobo, Jawa Tengah, Rabu (3/7/2024). Menurut petani, harga wortel turun menjadi Rp 7.000 perkilogram dari harga sebelumnya Rp 8.000/kg di tingkat petani karena dipicu panen raya wortel di sejumlah daerah.

KASUS DUGAAN KORUPSI APD KEMENKES KPK Sita Robot Pembasmi Covid-19

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rumah, apartemen, uang tunai, hingga robot pembasmi virus Covid-19 dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun anggaran 2020.

"Untuk perkara tersebut, pada Juni 2024, penyidik KPK telah melakukan penyitaan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/7).

Tessa Mahardika menjelaskan, KPK menyita enam rumah dan dua unit apartemen milik tiga tersangka di wilayah Jabodetabek. Kedelapan aset tersebut ditaksir bernilai kurang lebih Rp 30 miliar. Terkait penyitaan uang tunai, dilakukan KPK dari tersangka dan rekan bisnisnya. KPK menyita uang tunai Rp 1.540.200.000.

KPK juga menyita barang-barang dari para rekan bisnis tersangka, termasuk robot pembasmi virus Covid-19 (Automatic Intelligent Disinfection Robot) senilai Rp 500 juta. Kemudian, sepuluh Face Recognition Access Control Ter-

minal senilai total Rp 350 juta, tiga unit kendaraan roda empat yang terdiri satu truk boks dan dua mobil van, serta satu unit kendaraan roda dua.

"Penyidik KPK sampai saat ini masih terus menelusuri aset-aset lainnya yang diduga berasal dari dugaan tindak pidana korupsi perkara tersebut," ucap Tessa.

KPK mengharapkan laporan dari masyarakat dan kerja sama dari para pihak untuk kelancaran pengungkapan perkara tersebut. Tessa menyebut, perkara itu telah bergulir sejak September 2023 dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp 300 miliar.

Ia juga menyebut KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam perkara tersebut. Namun demikian, Tessa tidak meminci siapa saja tersangka yang dimaksud. Sebelumnya, KPK pada 9 November 2023 mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kemenkes. Informasi soal penyidikan itu dibenarkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Ant/San)-d

PERLU EDUKASI-LITERASI KEUANGAN

Mayoritas Peminjam Online Generasi Muda

JAKARTA (KR) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) memberikan edukasi literasi keuangan kepada anak muda di seluruh Indonesia tentang bahaya pinjaman online (pinjol) dan investasi ilegal terhadap anak muda.

Hal ini merespons tingginya persentase peminjam pinjaman online yang berasal dari usia 19-34 tahun, dalam anak-anak yang terjatuh judi online.

"Di era digital ini, anak-anak dan remaja menghadapi berbagai tantangan baru, termasuk bahaya pinjaman online dan investasi ilegal. Minimnya literasi keuangan menempatkan anak-anak dan remaja pada posisi berisiko menjadi korban dari praktik-praktik tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan mereka secara finansial

dan psikologis. Karena itu, literasi keuangan digital menjadi sangat penting sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemahaman yang memadai kepada anak-anak kita," ujar Deputy Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu pada Webinar Series Libur T'lah Tiba bertema Literasi Keuangan Digital: Bahaya Pinjaman Online dan Investasi Ilegal bagi Anak di Jakarta kemarin.

Pribudiarta menyampaikan, pinjol dan investasi ilegal menjadi ma-

salah yang paling mengancam kesejahteraan finansial anak dan remaja. Banyak dari mereka yang tertarik tawaran pinjaman cepat atau investasi ilegal karena imbal hasil tinggi tanpa memahami risikonya.

"Literasi keuangan digital harus diberikan sedini mungkin pada anak dan remaja. Edukasi ini berkaitan dengan kemampuan memahami dan mengelola keuangan secara efektif di tengah-tengah perkembangan dunia digital. Selain itu, literasi digital mencakup pengetahuan tentang penggunaan layanan keuangan digital dengan bijak, mengenali jenis-jenis penipuan dan cara menghindarinya, serta membuat keputusan finansial yang tepat penting diberikan, karena masa depan anak-anak masih

panjang," tutur Pribudiarta.

Pribudiarta menyampaikan, saat ini sedang disusun Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring. Melalui peraturan tersebut, diharapkan ke depan bisa menanganai permasalahan perlindungan anak di ranah digital.

Pribudiarta turut mengajak seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam menciptakan kondisi finansial yang sehat bagi generasi muda. Partisipasi tersebut dimulai dari lingkup keluarga hingga peran Forum Anak.

Ketua Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK Hudyanto menyampaikan, 60 persen pengguna pinjol merupakan anak muda. (Ati)-f

Angka Kemiskinan di DIY Sudah Turun

YOGYA (KR) - Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data kemiskinan. Data BPS menyebut, hingga Maret 2024 DIY masih menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Tingkat kemiskinan di DIY masih 10,83 persen. Angka itu menunjukkan masih ada 445.550 orang di DIY yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Merespons hal itu, Sekda DIY Beny Suharsono mengklaim, meski kemiskinan DIY masih tertinggi se-Jawa, namun angka kemiskinan di DIY sudah turun.

"Pemda DIY bukan tidak melakukan upaya apapun untuk menurunkan angka kemiskinan. Sejumlah program dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, di antaranya memberikan bantuan biaya hidup bagi warga lansia melalui Jaring Sosial Lansia (JSLU). Persentase penduduk miskin di DIY kan turun 0,21 poin persen dibandingkan Maret 2023, dan turun 0,66 poin persen dibandingkan September 2022," kata Beny Suharsono di Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (3/7).

Menurut Beny, sejumlah upaya terus dilakukan Pemda DIY untuk menekan angka kemiskinan yang tergolong masih tinggi. Termasuk memberikan bantuan biaya hidup bagi 8.000 lansia. Pemda DIY juga fokus pada pengembangan wilayah Selatan, mengingat masih terjadi kesenjangan pembangunan, terutama di Kawasan Selatan. (Ria)-d

KEJAGUNG FOKUS TUNTASKAN BERKAS

Perkara Korupsi Timah Segera Dilimpahkan

JAKARTA (KR) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kini fokus menuntaskan pemberkasan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 untuk segera dilimpahkan ke penuntutan.

"Kemarin ada pertanyaan kenapa *nggak* ada rilis pemeriksaan (saksi) lagi, karena penyidik sekarang fokus pemberkasan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenhum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Jakarta, Rabu (3/7).

Harli menjelaskan, penyidik fokus menyusun pemberkasan dari keterangan saksi-saksi yang dipanggil dari dokumen yang diperoleh. "Ini sekarang sedang diberkaskan," ujarnya.

Dari pemberkasan ini, lanjutnya, penyidik melihat apakah sudah cukup atau perlu ada pemanggilan saksi-saksi lagi untuk diminta keterangan. Oleh karena itu, be-

berapa pekan terakhir, tidak ada keterangan terkait pemeriksaan saksi-saksi yang dilakukan penyidik. "Tentu nanti dari hasil pemberkasan penyidik akan menilai apakah ini sudah dianggap cukup, kalau memang penyidik merasa perlu dilengkapi lagi, dipanggil saksi-saksi ya dipanggil lagi, tentu kita lakukan," ucap Harli.

Jika dari hasil pemberkasan tersebut dinilai penyidik sudah cukup, perkara dapat segera dilimpahkan ke penuntut umum untuk pembuktian di persidangan.

"Tapi kalau tidak lagi ya ini yang tentu kami harapkan bisa dilimpahkan ke penuntutan," jelasnya.

Harli menekankan, penanganan kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp 300 triliun itu masih berproses. Pihaknya memastikan kasus tersebut tidak berhenti. "Kami sangat terbuka. Makanya saya bilang ini sedang fokus untuk pemberkasan. Kalau ditanya kapan dilimpahkan, secepatnya," ujar Harli. (Ant/Obi)-f

TRANSAKSI DI KANTOR BANK BPD DIY

Nasabah Periksa Kesehatan Gratis



KR-Istimewa

Layanan kesehatan gratis di Kantor Bank BPD DIY.

YOGYA (KR) - Setiap awal bulan, nasabah Bank BPD DIY akan merasakan atmosfer berbeda di Kantor-kantor cabang Bank BPD DIY. Pasalnya, pada tanggal 1-3 setiap bulannya Bank BPD DIY memberikan layanan ekstra kepada nasabah dengan menghadirkan berbagai kuliner khas dari UMKM yang dapat dinikmati sambil menunggu transaksi.

Bank BPD DIY juga memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bekerja sama dengan rumah sakit, klinik mau-

pun laboratorium. Seperti terlihat di Kantor Cabang Utama, Bank BPD DIY bekerja sama dengan Kimia Farma memberikan pemeriksaan gratis kepada nasabah khususnya nasabah pensiunan. Nasabah yang melakukan transaksi di KCU pada 1-3 Juli 2024 bisa mengikuti layanan pemeriksaan gratis tersebut.

Direktur Utama Bank BPD DIY Santoso Rohmad menyampaikan, dengan menggunakan metode Quantum Resonance Magnetic Analyzer (QRMA) nasabah dapat mengetahui

kondisi kesehatan secara menyeluruh mulai dari analisis fungsi peredaran darah, hati, ginjal, mata, pencernaan dan lainnya. Petugas dari Kimia Farma juga memberikan penjelasan dari hasil pemeriksaan tersebut dan nasabah bisa melakukan konsultasi lebih lanjut jika diperlukan.

"Program ini telah rutin dilaksanakan setiap bulan. Tiap awal bulan Kantor-kantor Cabang Bank BPD DIY selalu ramai dikunjungi nasabah khususnya pensiunan yang datang untuk mengambil gaji, sehingga kami berinisiatif untuk menghadirkan UMKM dan pemeriksaan kesehatan gratis. UMKM-nya laris dan nasabahnya senang sekaligus sehat," kata Santoso.

Tidak hanya di KCU, di kantor cabang lain seperti Cabang Senopati, Sleman, Wates, Bantul dan Wonosari juga melakukan hal sama. Tiap kancab menghadirkan UMKM binaan masing-masing. (Rsv)-f

BANK BPD DIY

Lebih Nyaman dan Lega Wajah Baru Kantor Cabang Pembantu Ngeplak

Bank BPD DIY Cabang Pembantu (KCP) Ngeplak menempati gedung baru yang terletak di Jalan Besi Jangkang Km. 3,5 Jetis, Widodomartani, Ngeplak, Sleman. Kantor layanan baru tersebut telah dibuka dan beroperasi sejak tanggal 10 Juni 2024 yang lalu. Menempati gedung seluas 362 meter persegi diharapkan dapat memberikan layanan prima kepada nasabah.

Ruang tunggu nasabah yang lega dengan konsep modern minimalis didukung dengan fasilitas lengkap menjadikan suasana bertransaksi di KCP Ngeplak lebih hangat dan memudahkan nasabah.

Sebelum menempati gedung baru, KCP Ngeplak berlokasi di Jalan Raya Ngeplak Jangkang, Widodomartani, Ngeplak, Sleman. Bank BPD DIY memutuskan untuk merelokasi kantor layanan KCP Ngeplak sebagai salah satu strategi meningkatkan layanan kepada nasabahnya.

Direktur Utama Bank BPD DIY, Santoso Rohmad mengatakan bahwa jumlah nasabah dan volume transaksi di KCP Ngeplak terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga diperlukan kantor layanan yang lebih representatif agar meningkatkan kenyamanan transaksi nasabah.

"Ditahun 2023 rata-rata transaksi di KCP Ngeplak sebanyak 3.000-an dan terus meningkat, jumlah nasabah pun terus meningkat, untuk itu kami memandang perlu adanya kantor layanan yang mampu melayani nasabah dengan lebih baik lagi" kata Santoso

Selain itu, KCP Ngeplak saat ini juga bisa menyalurkan kredit kepada nasabah untuk berbagai keperluan. Harapannya kehadiran KCP Ngeplak dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut dengan penyaluran kredit produktif bagi pelaku usaha khususnya pelaku UMKM.

KCP Ngeplak juga dilengkapi dengan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai transaksi selama 24 jam.

Sebagai informasi, Kecamatan Ngeplak terdiri dari 5 desa dengan jumlah penduduk sekitar 63.331 jiwa. Dengan luas wilayah 35,71 kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Kecamatan Ngeplak adalah 1.801 jiwa per kilometer persegi. Desa yang relatif padat penduduknya adalah Desa Wedomartani dengan 2.448 jiwa per kilometer persegi.

Kecamatan Ngeplak memiliki potensi perekonomian yang cukup tinggi. Di wilayah ini terdapat berbagai sarana dan pusat perekonomian seperti pasar umum, pertokoan, lembaga pendidikan dan UMKM sehingga kehadiran KCP Ngeplak diharapkan dapat memberikan layanan dan solusi transaksi perbankan.

© bpddiy www.bpddiy.co.id Bank BPD DIY

KU 150061